

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desentralisasi fiskal merupakan kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pelayanannya untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dari tingkat provinsi sampai desa. Pemerintahan Indonesia yang semula bersifat sentralistik diubah sistemnya menjadi desentralistik karena pada prinsipnya pemerintah daerahlah yang lebih mengerti kondisi masyarakat yang ada di daerahnya (Huda, 2012).

Menurut Undang-Undang No 32 tahun 2004, adanya desentralisasi fiskal dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas. Oates dalam Lev Freinkman (2010) mengatakan bahwa pemerintah lokal lebih mengetahui preferensi dan kebutuhan masyarakat, sehingga apabila biaya penyediaan barang dan jasa publik adalah sama untuk pemerintahan lokal (kabupaten/kota) dan tingkat pemerintahan yang lebih tinggi, maka akan lebih efektif dan efisien apabila penyediaan tersebut diserahkan kepada pemerintah lokal.

Untuk penyediaan jasa dan barang publik ini diperlukan sumber fiskal yang memadai. Selain dana transfer dari pemerintah pusat , dengan adanya desentralisasi, setiap daerah dapat lebih memanfaatkan potensi daerahnya masing-masing sebagai sumber pendanaan dalam pembangunan. Sehingga daerah diarahkan untuk secermat mungkin dalam penggunaan dana APBDnya khususnya untuk daerah yang tidak kaya sehingga dapat memberikan kontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat (Ahmad, 2007).

Salah satu aspek untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah melalui pendidikan. Adanya pendidikan akan meningkatkan tenaga kerja yang

berkualitas. Tenaga kerja yang berkualitas akan mampu meningkatkan pendapatannya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan serta mampu mengurangi kemiskinan di masyarakat. Tugas utama pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan dan penyedia pelayanan publik untuk menyediakan fasilitas pendidikan, karena pendidikan merupakan bagian dari fasilitas publik yang menjadi hak bagi setiap warga masyarakat terutama di negara berkembang seperti Indonesia.

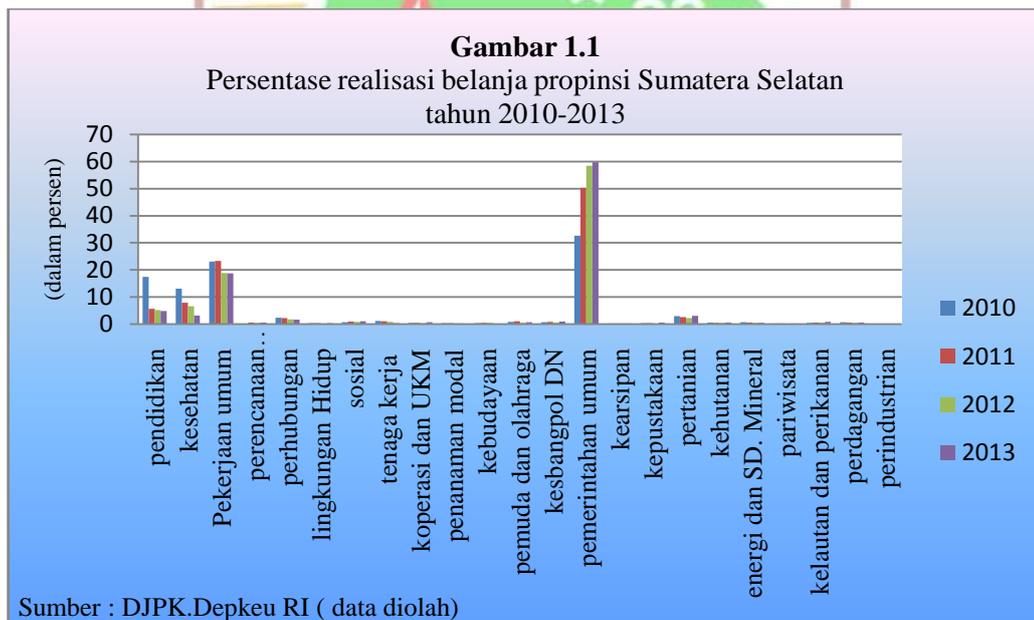
Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk terbesar tidak lepas dari masalah pendidikan. Indikator yang dapat digunakan untuk melihat keberhasilan Program Pembangunan Pendidikan, yakni ketersediaan layanan pendidikan, keterjangkauan layanan pendidikan, meningkatkan kualitas mutu pendidikan, mewujudkan kesetaraan untuk pendidikan, dan khususnya misi yang terakhir adalah menjamin kepastian mendapatkan layanan pendidikan atau pemerataan dalam layanan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota, belum dapat dipenuhi sampai saat ini. Hal ini dapat dilihat dari perbedaan angka partisipasi penduduk usia sekolah pada wilayah Indonesia bagian Timur lebih rendah di banding Indonesia bagian Barat terutama pada jenjang pendidikan menengah atas (Kemendikbud, 2013).

Untuk mengatasi masalah ketidakmerataan angka partisipasi di bidang pendidikan ini, pemerintah pusat membuat program untuk angka partisipasi penduduk usia sekolah untuk bersekolah seperti pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dimana Pendidikan

diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.

Menanggapi hal tersebut, khususnya provinsi Sumatera Selatan melalui RPJP 2005-2025 berupaya meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM), dan pemerataan pendidikan bagi semua kalangan. Implementasinya yaitu pelaksanaan program sekolah gratis 12 tahun berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 31 tahun 2009 dan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2009 yang menyatakan keseriusan pemerintah Propinsi untuk peningkatan kualitas pendidikan di Sumatera Selatan.

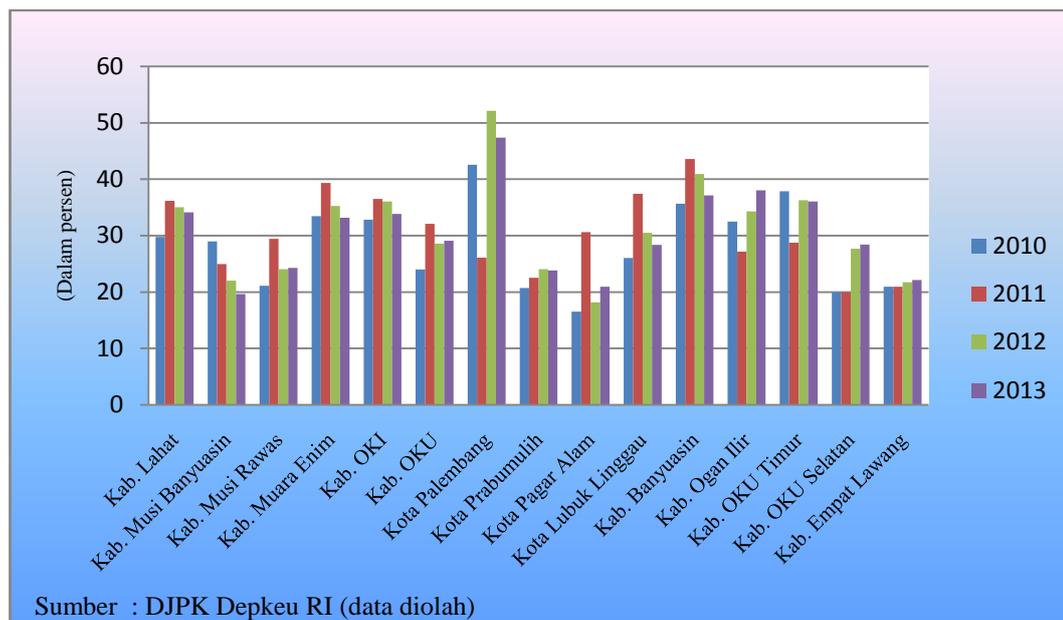
Hal ini dapat dilihat dari persentase belanja bidang pendidikan terhadap total belanja daerah.



Persentase belanja pemerintah daerah Sumatera Selatan bidang pendidikan dari tahun 2010-2013 menunjukkan persentase yang cukup besar dimana bidang pendidikan menempati urutan ke 4 setelah belanja bidang Pemerintahan Umum, Pekerjaan Umum dan Kesehatan.

Selain itu, sebagian besar kabupaten/kota di Sumatera Selatan telah mengalokasikan anggaran pendidikan diatas 20 persen. Hal tersebut bisa dilihat dari gambar 1.2 berikut :

Gambar 1.2
 Persentase belanja Bidang pendidikan Terhadap Total Belanja Daerah
 Menurut Kab/Kota di Sumatera Selatan
 Tahun 2010-2013



Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa belanja pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Selatan terhadap bidang pendidikan mengalami kenaikan setiap tahunnya. Belanja bidang pendidikan tertinggi pada tahun 2013 yakni Kota Palembang sebesar 47,38 persen. Sedangkan yang terendah terdapat pada kabupaten Musi Banyuasin sebesar 19,66 persen.

Pada tahun 2010, APM SMA/SMK terendah berada di Kabupaten OKU Timur dengan nilai 24,77 persen. Sedangkan APM tertinggi berada di Kota Prabumulih sebesar 63.74 persen. Pada tahun 2013 APM terendah berada di Kabupaten Banyuasin sebesar 24.38 persen dan yang tertinggi berada pada Kota Palembang sebesar 79.42 persen (BPS, 2013).

PDRB Perkapita kabupaten/kota di Sumatera Selatan juga tidak merata. Kabupaten Musi Banyuasin merupakan daerah dengan PDRB Perkapita tertinggi selama tahun 2010-2013 dengan nominal masing-masing sebesar 70.98 juta rupiah pada tahun 2010, dan 80.32 juta rupiah pada tahun 2013. Daerah dengan PDRB Perkapita terendah pada tahun 2010-2012 yaitu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKU Timur). Sedangkan PDRB Perkapita terendah pada tahun 2013 yaitu Kabupaten Empat Lawang (BPS, 2013).

Rasio murid per guru di Provinsi Sumatera Selatan selama tahun 2010-2013 cenderung mengalami fluktuasi untuk setiap kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan. Pada tahun 2010-2013, rasio murid per guru tertinggi berada pada kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU). Pada tahun 2010, rasio murid terhadap guru adalah 44.33 perorang guru. Tahun 2013 rasio murid per guru di OKU sebesar 35.74 murid perorang guru.

Dari fenomena yang terjadi , didapat bahwa peningkatan belanja untuk sektor pendidikan belum di ikuti dengan pemerataan *outcomes* bidang pendidikan dalam hal ini Angka Partisipasi Murni SMA/SMK di Sumatera Selatan.

Berdasarkan uraian diatas penulis mengangkat judul “**Analisis Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap *Outcomes* Pelayanan Publik Bidang Pendidikan SMA/SMK di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2010-2013**”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaruh belanja bidang pendidikan terhadap APM SMA/SMK Kabupaten/kota di Sumatera Selatan tahun 2010-2013?
2. Bagaimana Pengaruh PDRB Perkapita terhadap APM SMA/SMK Kabupaten/kota di Sumatera Selatan tahun 2010-2013?

3. Bagaimana Pengaruh Rasio Murid Per guru terhadap APM SMA/SMK Kabupaten/kota di Sumatera Selatan tahun 2010-2013?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Menganalisis pengaruh belanja bidang pendidikan terhadap APM SMA/SMK kabupaten/kota di Sumatera Selatan periode 2010-2013.
2. Menganalisis Pengaruh PDRB Perkapita terhadap APM SMA/SMK Kabupaten kota di Sumatera Selatan tahun 2010-2013.
3. Menganalisis Pengaruh Rasio Murid perguru terhadap APM SMA/SMK Kabupaten kota di Sumatera Selatan tahun 2010-2013.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk melihat pengaruh desentralisasi fiskal terhadap *outcomes* bidang pendidikan sebagai upaya peningkatan kualitas pendidikan dan pentingnya pendidikan di masyarakat.

2. Mahasiswa

Dengan adanya penelitian ini bisa di jadikan referensi dalam penelitian sejenis yang akan dilakukan selanjutnya.

3. Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang terkait dengan APBD dan pengambilan keputusan di masa yang akan datang.

1.5 Ruang Lingkup

Penelitian akan dapat dilakukan secara terarah dan lebih fokus atas masalah yang diteliti, maka perlu adanya ruang lingkup penelitian, yaitu penelitian menggambarkan bagaimana pengaruh belanja bidang pendidikan, PDRB Perkapita, dan rasio murid per guru, terhadap *outcome* pelayanan publik bidang pendidikan dalam hal ini *outcome* bidang pendidikan dilihat dari Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK. Karena keterbatasan data, maka waktu penelitian yang digunakan dimulai tahun 2010-2013 menggunakan data panel .Lokasi penelitian yaitu Propinsi Sumatera Selatan. Penggunaan variabel Kontrol PDRB perkapita dan Rasio murid guru SMA/SMK diharapkan bisa menjelaskan penelitian secara optimal.

1.6 Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian ini terdiri dari 6 Bab yaitu: Bab I Pendahuluan, Bab II Landasan Teori Tinjauan Pustaka, Bab III Metodologi Penelitian, Bab IV Gambaran Umum Daerah Penelitian, Bab V Temuan Empiris dan Implikasi Kebijakan dan Bab VI Penutup.

Bab I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan latar belakang penelitian. Dari latar belakang yang diuraikan maka diperoleh rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian. Berdasarkan rumusan masalah maka diperoleh tujuan dan manfaat dari penelitian. Selain itu,, juga adanya ruang lingkup penelitian. Pada akhir bab ini akan dijelaskan sistematika penulisan.

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

Menguraikan teori-teori dan penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai landasan dalam melakukan penelitian. Dari landasan teori dan penelitian terdahulu tersebut maka di dapat kerangka pemikiran konseptual. Di akhir bab ini terdapat hipotesis penelitian.

Bab III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang variabel-variabel penelitian dan defenisi operasional, Jenis dan sumber data, dan deskripsi analisis data yang akan digunakan.

Bab IV : GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

Pada bab ini akan menguraikan kondisi umum daerah dan kemudian menjelaskan perkembangan APM SMA/SMK, belanja bidang pendidikan, PDRB Perkapita, dan rasio murid guru selama periode 2010-2013 di Sumatera Selatan.

Bab V : TEMUAN EMPIRIS DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Dalam bab ini memuat hasil dan pembahasan dari analisa data yang telah di teliti serta merumuskan kebijakan apa yang perlu dan bisa di ambil dalam penelitian ini.

Bab VI : PENUTUP

Bab ini menjelaskan kesimpulan singkat dari penelitian yang telah dilakukan dan juga berisi saran untuk berbagai pihak.